

Mekanisme RPH di MK Sebelum Putusan Sengketa Pilpres 2024

JAKARTA (IM) - Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini sedang fokus melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk menentukan putusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Juru bicara MK, Fajar Laksono mengungkapkan RPH dilakukan 8 hakim konstitusi di lantai 16 Gedung MK. Mereka membahas untuk pengambilan keputusan dalam sengketa pilpres yang digugat pasangan calon (paslon) 01 Anies-Muhaimin, dan 03 Ganjar-Mahfud.

"RPH itu adanya di lantai 16. Jadi 8 hakim konstitusi itulah yang membahas sedemikian rupa dan nanti mengambil keputusan. Tentu di dalam RPH itu ada teman-teman saya yang sudah disumpah karena sudah RPH yang rahasia itu apapun yang terjadi di ruang RPH itu adalah rahasia," kata Fajar kepada

wartawan di Gedung MK, Rabu (17/4).

Waktu yang dibutuhkan hakim konstitusi menggelar RPH tak bisa diukur. Biasanya, RPH akan memakan waktu yang cukup lama.

"Enggak tentu ya. Bisa RPH panjang, bisa istirahat terus berlanjut. yang pasti setiap hari sekurang diadengankan RPH," ungkap Fajar.

"Jadi apa yang dibahas dalam RPH itu nanti, itulah yang nanti akan muncul dalam putusan," katanya.

Fajar menambahkan, jika para hakim dan pegawai MK yang terlibat dalam RPH tidak diperkenankan membawa apa lagi memainkan handphone demi kenyamanan jalannya RPH itu sendiri.

"RPH-RPH kemudian kita jaga juga. Bahkan, handphone itu enggak boleh dibawa ketika RPH. baik hakim maupun pegawai," ujar Fajar. ●han

KPK Setor Rp8,2 Miliar ke Kas Negara dari Kasus Korupsi Eks Wali Kota Ambon

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyetorkan uang ke kas negara. Kali ini, jumlahnya Rp8,2 miliar.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyatakan, uang tersebut merupakan pembayaran uang denda dan uang pengganti dari terpidana eks Walikota Ambon, Richard Louhenapessy dan Camat Jatisampurna, Wahyudih.

"Menjadi salah satu kinerja aktif dari Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Tim Jaksa

Eksekutor melalui biro keuangan, telah selesai melakukan penyetoran pelunasan uang pengganti dan uang denda sebesar Rp8,2 Miliar ke kas negara," kata Ali kepada wartawan.

Dengan disetorkannya uang tersebut, maka para terpidana telah melunasi uang denda dan uang pengganti atas kasus mereka.

"KPK akan tetap konsisten melakukan penagihan denda maupun uang pengganti dari para Terpidana dalam upaya memaksimalkan aset recovery," kata Ali. ●han

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



SIDANG LANJUTAN KORUPSI BANSOS

COVID-19 DI KEMENSOS

Terdakwa dugaan korupsi beras bansos Kemensos Ivo Wongkaren (kiri) dan Roni Ramdani (kanan) mengikuti sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (17/4). Sidang beragendakan mendengarkan lima saksi yang di hadirkan oleh JPU KPK.

Firli Bahuri Disebut Minta Rp50 Miliar ke Mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo

Ajudan mengaku bahwa SYL sempat panik ketika mendengar berita rumah dinasnya di geledeh KPK dan menyita senjata dan uang tunai Rp40 miliar.

JAKARTA (IM) - Firli Bahuri saat masih menjabat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut meminta uang Rp 50 miliar kepada eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Adanya permintaan uang ini terungkap saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) eks Aide-camp (ADC) atau ajudan SYL, Panji Harjanto.

Panji dihadirkan Jaksa KPK sebagai saksi kasus

dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI yang menjerat Syahrul Yasin Limpo.

"Ada di BAP 34, saudara mengetahui terkait dengan permintaan uang dari Firli Bahuri bahwa di sini yang saat itu SYL menyatakan terdapat permintaan Rp 50 miliar dari Firli Bahuri. Itu saudara ketahui dari percakapan atau dari apa nih?" tanya Jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (17/4).

"Dari percakapan Bapak (Syahrul Yasin Limpo)," kata Panji.

Panji menceritakan bahwa saat itu SYL tengah berbincang dengan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta, di ruang kerjanya. Ketika mendengar percakapan tersebut, Panji memutuskan untuk ke luar dari ruangan.

"Pada saat itu, Syahrul Yasin Limpo mengatakan terdapat permintaan uang Rp 50 miliar dari Firli Bahuri. Tapi setelah mendengar perkataan tersebut, karena saya merasa itu adalah percakapan rahasia, sehingga saya ke luar dari ruangan," kata Jaksa membacakan BAP Panji.

"Sepengatahuan Saudara, apakah ada informasi-informasi, karena Saudara itu

ajudan ya, bahwa Syahrul Yasin Limpo sendiri mengemukakan hal-hal terkait dengan adanya info mengenai permintaan uang ini adalah terkait dengan apa?" tanya Jaksa.

"Ada masalah di KPK," jawab Panji.

"Saudara tahu dari mana?" tanya Jaksa melanjutkan.

"Waktu itu, eselon satu dikumpulkan di Wican (Widya Chandra, Rumah Dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo). Ada surat penyidikan," ujar Panji.

"Kapan itu?" cecar Jaksa lagi.

"Sekitar 2022," kata Panji.

"Saudara ada di situ?" tanya Jaksa kemudian.

"Ada," jawab eks Ajudan SYL itu.

SYL Terlihat Panik

Masih menurut kesaksian Panji di persidangan, ketika mengetahui rumah dinas di Jalan Widya Chandra, digeledah petugas KP, SYL terlihat panik.

Saat KPK melakukan pengeledahan, SYL masih

berada di Spanyol, dan Panji mendampingi. Dalam pengeledahan itu, penyidik antirasuah itu menyita senjata dan uang tunai puluhan miliar rupiah.

"Saudara kan langsung dengan terdakwa waktu itu, gimana terdakwa waktu itu gimana? apakah beliau tenang aja atau ada kelihatan agak panik atau apa?" tanya Ketua Majelis Hakim, Rianto Adam Pontoh.

"Bapak (SYL) panik," jawab Panji.

SYL pun langsung memerintahkan Panji untuk mengecek kondisi terkini rumah dinasnya yang digeledah KPK.

"Yang saudara tahu setelah pengeledahan itu, apa yang diambil dari rumah dinasnya?" tanya Rianto.

"Informasinya ada uang," jawab Panji.

"Uang berapa banyak?" cecar Hakim.

"Kurang lebih Rp40 miliar," timpal saksi.

"Uang cash?" tanya Hakim lagi.

"Mata uang asing sama senjata," ujarnya. ●mar

SENGKETA HASIL PIPRES 2024

Gerindra Bakal Intens Berkomunikasi dengan PDI-P Setelah Ada Putusan MK

JAKARTA (IM) - Ketua Hari Partai Gerindra Sumi Dasco Ahmad menyebut, komunikasi antara pihaknya dengan PDI-P bakal lebih intens setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Dasco, tidak ada halangan untuk berkomunikasi antara calon presiden (capres) pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Sebab, hubungan keduanya baik-baik saja.

"Pak Prabowo sangat menghormati Bu Mega. Dan saya pikir komunikasi-komunikasi lebih intens mungkin akan ditingkatkan setelah putusan MK," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/4).

Dasco mengatakan bahwa Prabowo dan Megawati tidak pernah berselisih. Oleh karena itu, tidak ada yang perlu direkonsiliasi dalam hubungan Prabowo dan Megawati.

Ia menekankan bahwa Prabowo sangat menghormati Megawati sebagai tokoh bangsa.

"Jadi, sebenarnya kalau ada yang ngomong rekonsiliasi saya pikir enggak ada yang perlu direkonsiliasi. Karena tidak pernah ada yang namanya perselisihan, yang namanya perpecahan antara kedua tokoh ini," katanya.

Sebelumnya, politikus PDI-P Aryo Seno Bagaskoro mengaku, tidak sepakat jika belum terlaksananya pertemuan antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto, karena faktor bayang-bayang Presiden Joko Widodo (Jokowi).

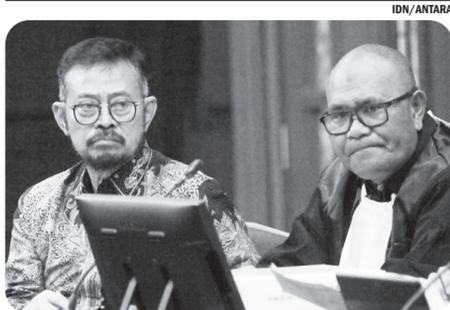
Menurut Seno, PDI-P menunggu semua tahapan di Mahkamah Konstitusi (MK) menyangkut perselisihan hasil Pilpres 2024, sebelum menentukan kapan Megawati dan Prabowo akan bertemu.

"Pada dasarnya, kami tidak diajarkan untuk ber-

sikap isuk tempe sore dele (pagi tempe, sore kedelai). Berubah-ubah mengikuti tren semata. Dalam berpolitik idealnya konsisten pada prinsip dan sikap," kata Seno kepada wartawan, Minggu (14/4).

Seno menegaskan bahwa PDI-P kini masih berfokus pada mengkritisi pelaksanaan Pemilu 2024, terutama Pilpres yang banyak dianggap sebagai Pemilu terburuk sepanjang sejarah. PDI-P masih mengganggap Pemilu 2024 penuh dengan intervensi kekuasaan, pelanggaran etik hingga mobilisasi bantuan politik terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) tertentu.

"Hantaman pada demokrasi yang demikian keras itu harus direparasi. Jadi fokus kami hari ini sedang ke sana. Baik melalui perlawanan hukum di MK dan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), secara politik, maupun melalui jalur pelembeagaan Partai," ujar Seno. ●han



SIDANG LANJUTAN SYAHRUL YASIN LIMPO

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo (kiri) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (17/4). Sidang lanjutan beragenda mendengarkan keterangan empat saksi yang dihadirkan JPU.

Longsor di Tana Tora Tewaskan 20 Orang, Terburuk dalam Tahun Ini

JAKARTA (IM) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebut, peristiwa tanah longsor di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, yang menewaskan 20 orang, merupakan bencana longsor terburuk dalam tahun 2024 ini.

"Sebenarnya kalau kita lihat secara umum ya untuk sisi frekuensi kejadian itu tidak terlalu banyak bencana, cuma memang yang terjadi hari Sabtu lalu (13/4) di Tana Toraja, memakan banyak korban, ya 20 jiwa," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam Disaster Briefing secara virtual, dikutip Rabu (16/4).

"Ini mungkin dalam catatan BNPB di awal tahun ini dari Januari sampai ke April, ini longsor terburuk ya di tahun ini. Meskipun memang dari awal tahun yang kita perhatikan longsor cukup signifikan dalam konteks korban jiwa," katanya menambahkan.

Aam mengatakan, cuaca pada saat kejadian longsor di Tana Toraja tidak begitu ekstrem. Bahkan, ketebalan awan dari citra satelit juga tidak terlalu signifikan mendukung terjadinya cuaca ekstrem pada saat kejadian.

Sebab itu, kata Aam, tim dari BNPB sedang melakukan kajian mengenai bencana longsor yang melanda Tana Toraja baik dari sisi geologis maupun hidrologis. "Memang tim BNPB saat ini sedang di lapangan, sedang di Tana Toraja, kita juga ingin melihat kira-kira sebenarnya dari sisi apakah itu geologis atau hidrologis apa yang menyebabkan tanah longsor ini," ujarnya.

"Sehingga kita bisa kemudian mapping untuk menghindari menyusun apa pola-pola mitigasi untuk menghindari kejadian serupa di masa depan," ujarnya. ●mci

PENGUMUMAN

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 16 April 2024 No. 393, yang dibuat di hadapan Notaris Sugeng Purnawan, S.H., Telah diambil keputusan untuk membubarkan Perseroan Terbatas PT. GRAHA INDO MANDIRI, berkedudukan di Jakarta Barat.

Demikian pengumuman ini dibuat atas kesepakatan bersama.
Direksi
PT. GRAHA INDO MANDIRI



MANTAN BUPATI BONE BOLANGO DITAHAN KEJAKSAAN

Mantan Bupati Bone Bolango Hamim Pou (tengah) dibawa petugas menuju mobil tahanan di Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Kab. Bone Bolango, Gorontalo, Rabu (17/4). Hamim Pou ditahan atas kasus dugaan penyelewengan dana Bansos tahun anggaran 2011-2012 pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone Bolango dengan kerugian negara mencapai Rp1,7 miliar.

Seribu Lebih Mahasiswa Indonesia Menjadi Korban TPPO di Jerman

JAKARTA (IM) - Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, menyatakan keprihatinan yang mendalam terkait adanya 1.000 lebih mahasiswa dari 33 Universitas dengan program magang atau ferien job ke Jerman, menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Ia menegaskan, TPPO sendiri merupakan kejahatan serius terhadap HAM yang dapat merusak martabat dan integritas individu.

"Adik-adik mahasiswa ini tentu berada dalam situasi di mana hak-hak dasar mereka diabaikan. Kami yakin aparat penegak hukum memiliki kepedulian yang sama sehingga dapat menangani persoalan ini dengan baik dan tepat," katanya dalam siaran pers, Rabu (17/4).

Menurut Dhahana, Kementerian Hukum dan HAM sejatinya telah melakukan sejumlah langkah untuk mencegah Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi korban TPPO.

"Misalnya, Ditjen Imigrasi memperketat proses pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan proses permohonan paspor bagi PMI melalui profiling pemohon paspor berjenis kelamin wanita berusia antara 17 sampai dengan 45 tahun. Hal ini sebagai upaya dalam mencegah terjadinya TPPO" imbuhnya.

Kemenkumham juga mewajibkan pemohon paspor untuk menyertakan penjamin. Nantinya, penjamin akan bertanggung jawab jika ada indikasi perdagangan orang ataupun tindak kejahatan lainnya yang terjadi kepada pemilik paspor.

Selain itu, Direktur Jenderal HAM mengungkapkan

bahwa pemerintah Indonesia merupakan negara pihak dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Konvensi tersebut diratifikasi dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2012.

"Ini menunjukkan bahwa pemerintah sejatinya memiliki komitmen dalam memberikan perlindungan bagi PMI sekaligus menolak terjadinya TPPO," ujarnya.

Namun menurut Dhahana bahwa TPPO merupakan persoalan yang tidak sederhana untuk dibenahi. Meskipun pemerintah telah melakukan langkah-langkah pencegahan dan penindakan. Pasalnya, terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kondisi ekonomi dan psikologis masyarakat menengah ke bawah di Tanah Air.

"Dengan iming-iming atau janji mendapatkan penghasilan yang fantastis di luar negeri, tentu tidak sedikit masyarakat menengah ke bawah tergoda jebakan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Yang pada akhirnya membuat mereka menjadi korban TPPO," tutur Dhahana.

Untuk itu, Dhahana memandang bahwa perlu kolaborasi yang matang dari seluruh kementerian dan Lembaga terkait untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait TPPO kepada publik.

"Kami di Direktorat Jenderal HAM melihat adanya urgensi untuk melakukan diseminasi HAM terkait dengan bahaya TPPO isu ini utamanya bagi adik-adik kita gen z yang memang akan menghadapi dunia kerja," katanya. ●han